



Bantuan tangan kasih (Keberpihakan pemerintah daerah dalam upaya stabilisasi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Sorong)

Helping hands of love

(Local government alignment to stabilize social and economic
resilience of communities in Sorong City)

Awal Fikri¹, Salmawati², Ana Lestari^{3*}

Universitas Muhammadiyah Sorong ^{1,2,3}

Email Correspondence: alannalestari034@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and describe the form of government alignments in efforts to stabilize the social and economic resilience of the community in the implementation of Bantuan Tangan Kasih in Sorong City in 2021 to 2022. This research uses a descriptive qualitative approach. Location research was conducted in Sorong City, precisely at the Sorong City Manpower Office as the authorized agency in the implementation of Bantuan Tangan Kasih. Data collection techniques were carried out using observation, interview and documentation methods. The data analysis technique uses the Huberman and Miles interactive analysis model, namely, data reduction, data display, conclusion drawing. Bantuan Tangan Kasih is a social assistance program that focuses on people who are not validated as beneficiaries of social assistance from the government, for example, BPNT, BLT, PKH or other similar social assistance. The principle of no left behind is a form of government partiality to people who are economically disadvantaged but not validated as recipients of government assistance or complementary social assistance. The alignment aspect of the Sorong City Government is clearly visible after the implementation process which includes data collection of prospective recipients, distribution and reports on the results of the implementation of the Bantuan Tangan Kasih Assistance has been completed. From 2020 to 2022, the Hand of Love Assistance in Sorong City has been implemented well and received a positive response from the community. The form of government partiality can be interpreted through the process of creativity/innovation, implementation, commitment.

Keywords: *Social Assistance, Local Government Alignment, Social and Economic Resilience*

Pendahuluan

Dinamika kemiskinan dan pemenuhan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan problem klasik yang terjadi di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kompleksitas masalah sosial ini dipengaruhi oleh beragam faktor, misalnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, rumah tangga dengan pendapatan ekonomi rendah serta semakin bertambahnya usia yang tidak produktif lagi dalam bekerja sehingga tidak mampu lagi berkontribusi dalam membiayai operasional keluarga, sebaliknya menjadi beban ekonomi dalam keluarga.

Kondisi kemiskinan pada suatu negara akhirnya akan berujung pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Kesejahteraan dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana kebutuhan hidup yang layak dapat terpenuhi oleh kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat mampu berdaya diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pembangunan kesejahteraan masyarakat ini menjadi bagian yang terintegrasi dengan *roadmap* pembangunan nasional dimana kebijakan pembangunan kesejahteraan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, karena pada prinsipnya skema pembangunan kesejahteraan terdiri atas serangkaian kegiatan yang lahir dari sebuah kebijakan dan direncanakan untuk memajukan dan meningkatkan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan program kesejahteraan tersebut.

Negara adalah organisasi publik yang mempunyai target dan tujuan dimana, target dan tujuan tersebut harus direalisasikan, namun pada aspek lain, negara juga memiliki berbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu, nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujud yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik. (Dunn 2003)

Dalam kehidupan bernegara-bangsa, apa pun yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam konteks perwujudan tujuan kehidupan bersama selalu didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang memang diberikan kewenangan atau otoritas untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit, sehingga disebut kebijakan publik. (Sutmasa 2021)

Negara atau pemerintah harus mampu merespon dengan cepat kebutuhan, keinginan, tuntutan dan kepentingan yang ada dalam kehidupan

masyarakat, walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memverifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dan menempatkan pada jenjang prioritas, karena tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. (Abidin 2019)

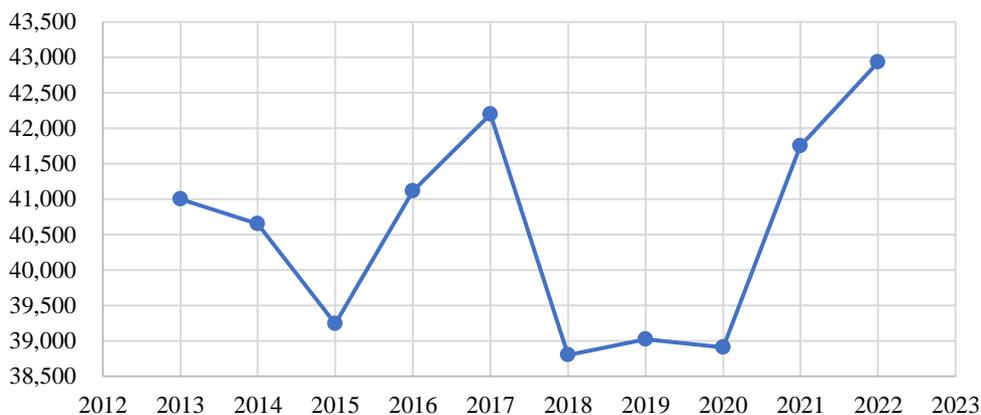
Beragam penelitian ilmiah telah dilaksanakan terkait dengan tema implementasi kebijakan sosial, adapun kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa kebijakan dan program pelayanan telah banyak dilakukan namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan pencapaian tujuan program. Meskipun kebijakan sosial, yang menjadi pedoman dalam penyusunan program, telah dirancang dengan baik, tidak berarti pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dapat diinterpretasikan oleh pihak-pihak yang terkait. Terutama, bagaimana suatu kebijakan diinterpretasikan menjadi pedoman yang lebih aplikatif untuk menjadi panduan dalam implementasi kebijakan tersebut. (Fedriansyah 2016)

Bantuan sosial dianggap menjadi salah satu solusi dalam mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, beragam metode penyaluran bantuan telah diimplementasikan oleh negara-negara yang sedang berkembang di belahan dunia, seperti bantuan pangan non tunai atau dengan cara melakukan transfer langsung ke rekening penerima bantuan. (Adger 2000), selanjutnya, menurut Barrientos bahwa bantuan sosial dapat membantu mengatasi program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, meningkatkan pelayanan dasar dan mendukung kapasitas rumah tangga produktif yang berada dalam garis kemiskinan sekaligus perlindungan sosial bagi rumah tangga. (Barrientos 2013)

Bantuan Tangan Kasih merupakan program dari kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemberdayaan dan program peningkatan sumber daya masyarakat Papua Barat baik dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan keagamaan. Kebijakan Program Bantuan ini merupakan inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan setiap tahun dalam APBD Provinsi Papua Barat.

Berikut ini adalah gambaran atau infografis mengenai kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Sorong Tahun 2013 hingga 2021.

Gambar 1
Jumlah Penduduk Miskin Kota Sorong
Per Tahun 2013-2022



Sumber : Olah data dari sumber Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan infografis di atas, jumlah penduduk miskin di Kota Sorong tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah 42.930 orang dan terendah pada tahun 2020 dengan jumlah 38.910 orang. Adapun rata-rata jumlah persentase peningkatan dalam kurun waktu 9 tahun sebanyak 0,61 persen. Peningkatan masyarakat miskin di Kota Sorong yang melonjak pada tahun 2022 dominan dipengaruhi oleh pandemi covid-19, di sisi lain juga dipengaruhi oleh waktu yang cukup lama dalam proses *recovery* setelah pemerintah menyatakan endemi penyebaran covid-19.

Bantuan Tangan Kasih merupakan program prioritas dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dimana penyelenggaraan bantuan ini didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam lingkup provinsi Papua Barat. Pada dasarnya, tujuan dari program ini adalah untuk menunjukkan keinginan dan tekad pemerintah untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dengan skema bantuan sosial.

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan bagi calon penerima Bantuan Tangan Kasih di Provinsi Papua Barat :

Tabel 1.Syarat dan Ketentuan
Calon Penerima Bantuan Tangan Kasih

No	Syarat dan Ketentuan Penyortiran Berkas Calon Penerima Bantuan Tangan Kasih Tahun 2021	
1	Syarat Umum	a. Jumlah Penerima dibatasi hanya satu orang dalam satu keluarga b. Batas usia penerima pada tahun 2021 yaitu 20-66 tahun (lahir dari 1956 hingga 20001)

		<p>c. Bukan PNS, TNI/POLRI, Pensiunan/Purnawirawan, Karyawan, Honorer Daerah, Dosen, Guru, Karyawan BUMN/BUMD</p> <p>d. Memiliki KTP Kota Sorong, selain itu tidak akan dilakukan pendataan</p> <p>e. Memiliki KTP Elektrik (bukan KTP Nasional)</p>
2	Syarat Khusus	Calon penerima Bantuan Tangan Kasih (BTK) adalah mereka yang belum pernah menerima BTK tahap I/II, BST, BLT, PKH, dan jenis bantuan lain yang bersumber dari Pusat maupun daerah, untuk itu Disnaker akan berkoordinasi dengan OPD lain (Dinas Sosial, Koperasi dan UMKM, Kantor Pos, serta instansi lain yang terkait dengan penyaluran bantuan sejenis)

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, 28 Maret 2022

Berdasarkan tabel di atas, kualifikasi penerima bantuan ini lebih ditekankan kepada masyarakat yang tidak tervalidasi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pada tahun berjalan. Penerapan kualifikasi ini didasarkan pada unsur ekualitas, yang dapat dimaknai bahwa seluruh masyarakat Kota Sorong yang memiliki KTP elektronik wilayah Sorong dan tergolong kurang mampu secara ekonomi dapat didata dan divalidasi untuk menjadi calon penerima manfaat Bantuan Tangan Kasih.

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda sebagian besar belahan dunia termasuk Indonesia, dan kondisi ini memaksa pemerintah untuk dapat beradaptasi, *survive*, dan hidup berdampingan dengan normal dengan penyebaran virus ini. Covid-19 adalah dilema yang dirasakan oleh warga negara, keluarga dan pembuat kebijakan. Para pekerja dihadapkan pada pilihan antara tetap berada di dalam rumah mereka dalam upaya melindungi diri dan keluarga mereka dari penularan virus atau mereka harus bekerja untuk melindungi pekerjaan dan pendapatan keluarga. (Pereirinha and Pereira 2021)

Di Papua Barat, khususnya di Kota Sorong, dampak dari penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pembatasan kegiatan atau mobilisasi masyarakat sebagai langkah *preventif* untuk menekan laju penyebaran Covid-19 menyebabkan masyarakat tidak dapat bekerja secara maksimal dan hal ini sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat. Sistem *lockdown* yang diterapkan Pemerintah Kota Sorong mengakibatkan banyak perusahaan yang menghentikan kegiatan operasional dan merumahkan karyawan hingga berakhir pada pemutusan hubungan kerja.

Pada tahun anggaran 2020, dengan menggunakan *refocusing* (mengalihkan besaran anggaran suatu program pada program yang lebih penting dengan alasan urgen untuk segera ditanggulangi) anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat menyalurkan Bantuan Tangan Kasih pada 32.317 orang di 12 Kabupaten dan 1 Kota, dengan nilai masing-masing penerima sebesar Rp. 5,4 juta. Jumlah penerima itu ditambah 20.000 orang di

seluruh Kabupaten dan Kota dengan jumlah nominal yang sama. Pada tahun anggaran yang sama, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah menyalurkan bantuan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari sebanyak 275 orang dengan besaran masing-masing Rp.5,4 juta. (<https://papuakini.co/2021/09/24/kadistransnaker-papua-barat-tangan-kasih-kebijakan-gubernur-dana-apbd-data-penerima-dari-kabupaten-kota/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022).

Pada tahun anggaran 2021, target dan realisasi Bantuan Tangan Kasih dilaksanakan penyaluran bantuan dalam dua tahap dan terbagi dalam 2 (dua) jenis program yaitu, Bantuan Bahan Pokok dan Stimulus UMK. Target penyaluran program ini menysasar 36.166 penerima di seluruh wilayah Papua Barat, dan di Kota Sorong sebanyak 6000 (enam ribu) penerima bantuan dengan besaran jumlah bantuan sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, yang dianggarkan dalam DIPA Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Papua Barat.

Melalui Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor 466/46/2021 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Tunai Pasca Kerja/Dirumahkan Program Tangan Kasih Pemerintah Provinsi Papua Barat Kepada Pekerja Formal dan Informal Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kota Sorong Tahun 2021 telah menetapkan sebanyak 6000 (enam ribu) orang yang berhak untuk mendapatkan santunan Bantuan Tangan Kasih Tahun Anggaran 2021, selanjutnya biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan di atas dibebankan pada APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021. Daftar nama-nama tersebut di atas selanjutnya diajukan kepada Gubernur Papua Barat untuk disahkan sebagai penerima bantuan.

Keberpihakan pemerintah ini secara makro bertujuan untuk menjaga stabilitas ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketahanan Sosial adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk megembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan dengan gangguan yang baik yang datang dari dalam maupun luar secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. (Afrizal and Handrisal 2019).

Beberapa bantuan, selain bantuan dari Pemerintah, telah diterima oleh sebagian besar keluarga. Walaupun demikian, mereka tidak dapat sepenuhnya hanya tergantung dari bantuan tersebut, karena bantuan bersifat sementara. Keluarga harus memulai kembali untuk memperoleh pendapatan, Hanya saja, untuk memulai pekerjaan mereka kembali dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga menjadi hal yang tidak mudah. Banyak kendala dihadapi, antara lain perlu modal kembali, adanya kepercayaan mitra, pemasaran di saat pandemi dan sebagainya.

Selain itu hal yang sangat mengawatirkan adalah terganggunya ketahanan ekonomi keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga dipahami sebagai keadaan dinamis suatu keluarga mengenai kegigihan dan kekuatan

dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan baik dari eksternal maupun dari internal, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan perekonomian keluarga. Sebagai unit terkecil dari sebuah negara, keluarga dengan ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan dasar ekonomi negara yang kuat pula. (Wulandari 2017)

Ketahanan ekonomi keluarga berperan penting dalam membentuk ketahanan ekonomi negara, karena ekonomi negara akan kuat jika setiap keluarga yang ada di negara tersebut memiliki ekonomi yang kuat. Peran pemerintah memang sangat besar untuk dapat menghidupkan kembali perekonomian keluarga dan masyarakat, namun keluarga/rumah tangga juga harus memiliki kemauan, tekad dan optimisme yang tinggi untuk dapat bertahan dan bangkit dari kondisi keterpurukan ini. (Rachmawati et al. 2022)

Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini menitikberatkan pada aspek keberpihakan Pemerintah Kota Sorong dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan sosial dan ekonomi Masyarakat melalui skema Bantuan Tangan Kasih. Selanjutnya, mendeskripsikan bentuk dan indikator keberpihakan tersebut dengan narasi ilmiah sehingga mampu difahami secara sistematis oleh penggiat atau pemerhati masalah kebijakan, ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menitikberatkan kemampuan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian, dalam penyajian data dan fakta penelitian akan disajikan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metodologi yang menitikberatkan pada proses penggunaan dan mengkoleksi variasi materi-materi empiris, studi kasus, pengalaman personal, introspektif, *life history*, *interview*, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan rutinitas dan problem waktu dan arti hidup individual. (Pradoko, Susilo 2017). Penelitian kualitatif menekankan pada kemampuan peneliti sebagai subjek atau instrumen penelitian. (Sugiyono 2013). Tugas analitik yang lebih besar bukanlah menjadi peneliti kualitatif, tetapi pada apa yang peneliti kerjakan yang merujuk pada esensi kualitatif. (Saldaña 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sorong, tepatnya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong sebagai instansi yang berwenang dalam pelaksanaan Bantuan Tangan Kasih Tahun Anggaran 2020-2022. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Huberman dan Miles yaitu, reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan. (Nursapiah 2020).

Pembahasan

Program Bantuan Tangan Kasih ini merupakan buah pemikiran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membantu masyarakat dalam

meningkatkan kualitas hidup mereka yang mencakup dimensi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui strategi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan komunitas dan keagamaan.

Menjadi hal yang menarik dari kebijakan bantuan ini, menurut peneliti adalah alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Bantuan Tangan Kasih. Anggaran yang digunakan adalah hasil dari *re-focussing* dari anggaran APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021. Kebijakan *re-focussing* diartikan sebagai proses pengalihan anggaran suatu program yang telah ditetapkan di dalam postur APBD pada tahun anggaran berjalan. Pengalihan ini didasarkan pada diskresi pemerintah dengan pertimbangan urgensi dan prioritas suatu masalah yang telah dihadapi oleh daerah dan masyarakat. Kebijakan program ini juga menjadi bukti tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendengarkan aspirasi dari bawah dan sebagai respon dari aspirasi tersebut kebijakan program ini dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran (*bottom-up*).

Aspek keberpihakan Pemerintah Kota Sorong terlihat dengan jelas setelah proses penyelenggaraan yang meliputi pendataan calon penerima, penyaluran dan laporan hasil penyelenggaraan Bantuan Tangan Kasih telah rampung. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, Bantuan Tangan Kasih di Kota Sorong telah diimplementasikan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun bentuk keberpihakan pemerintah dapat dimaknai melalui proses kreativitas/inovasi, implementasi, komitmen.

Inovatif, program ini merupakan hasil kreativitas dan inovasi pemerintah yang belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian Ibu Ernawati Siregar selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat, terkait Kebijakan Program Bantuan Tangan Kasih, beliau menyatakan bahwa Bantuan Tangan Kasih Tahun Anggaran 2020 dan 2021 merupakan kebijakan Gubernur Papua Barat yang yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia, jadi ini merupakan inovasi program yang benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan salah satu bentuk perhatian gubernur terhadap apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat Papua Barat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menilai bahwa kebijakan Program Bantuan Tangan Kasih ini adalah inovasi dari Gubernur Papua Barat dan merupakan suatu prestasi yang perlu mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat. Proses keberpihakan dari pemerintah terlihat dari kemampuan pemerintah dalam menemukan solusi yang efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan diberlakukannya pembatasan mobilitas masyarakat di Provinsi Papua Barat, berakibat pada terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah dan melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil yang terdampak dari pembatasan mobilitas ini, Gubernur Papua Barat mengambil tindakan cepat dengan mengeluarkan kebijakan strategis berupa Bantuan Tangan Kasih untuk

Pekerja Informal yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 dengan melakukan *refocussing* pada anggaran APBD tahun 2020 dan 2021.

Implementatif, yaitu kemampuan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Tangan Kasih, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat yang telah tervalidasi sebagai penerima bantuan. Proses implementasi program akan mengalami perlakuan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. SOP yang telah ditetapkan pemerintah dilain sisi, masih membutuhkan perilaku pemerintah yang adaptif terhadap dinamika yang berkembang pada suatu daerah.

Keberpihakan pemerintah dalam penyelenggaraan Bantuan Tangan Kasih terlihat selama proses implementasi program berlangsung. Peneliti melakukan analisa terkait dengan kebijakan bantuan sosial, pendekatan intensif kepada kelompok sasaran, implementor dan menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program Bantuan Tangan Kasih di Kota Sorong.

Bantuan Tangan Kasih merupakan program dari kebijakan yang sudah ideal untuk diimplementasikan, karena tidak bertentangan dengan kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi, mudah dimengerti oleh unsur penyelenggara dan kelompok sasaran penerima manfaat serta tidak memberikan implikasi negatif terhadap masyarakat. Interaksi yang terjalin antara perumus kebijakan, implementor (pelaksana kebijakan) dan kelompok sasaran juga sangat terjalin dengan baik. Hal-hal yang diharapkan oleh perumus kebijakan dengan terimplementasikannya kebijakan program Bantuan Tangan Kasih ini agar tersampaikan kepada kelompok sasaran juga sudah terlaksana dengan sangat baik.

Bantuan Tangan Kasih adalah program bantuan sosial yang menitikberatkan pada masyarakat yang tidak tervalidasi sebagai penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah misalnya, BPNT, BLT, PKH atau bantuan sosial sejenis lainnya. Prinsip *no left behind* merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu tetapi tidak tervalidasi sebagai penerima bantuan pemerintah maupun bantuan sosial yang bersifat komplementer.

Sebagai langkah konkrit atas keberpihakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Sorong adalah selain menyalurkan bantuan uang tunai yang ditransfer langsung melalui rekening penerima, melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait pembuatan kartu Jaminan Hari Tua bagi setiap penerima Bantuan Tangan Kasih.

Commitment yaitu sikap pemerintah Kota Sorong dalam memenuhi janji yang tertuang dalam visi misi pemerintahan yaitu dengan menerapkan prinsip *no left behind* dalam pelayanan bantuan sosial. Kebijakan program ini juga menjadi bukti tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendengarkan aspirasi dari bawah dan sebagai respon dari aspirasi tersebut kebijakan program ini dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran (*bottom-up*).

Keberpihakan Pemerintah Kota Sorong terkait komitmen bahwa seluruh masyarakat yang dikategorikan dapat menjadi penerima manfaat bantuan melalui proses pendataan dan verifikasi faktual, dipastikan nama mereka tercantum dalam lampiran nama-nama penerima bantuan yang disahkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat. Dalam melaksanakan proses pendataan, Pemerintah Kota Sorong melibatkan seluruh ASN dan tenaga honorer dalam lingkup Disnaker Kota Sorong. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kualifikasi dan jumlah penerima manfaat Bantuan Tangan Kasih.

Proses pendataan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja tetap tidak memuaskan seluruh pihak. Hal ini terlihat jelas dengan munculnya protes dari kalangan masyarakat yang namanya telah di data tetapi tidak dapat memperoleh bantuan. Protes ini mendapat perhatian khusus dari Dinas Tenaga Kerja dan Pemerintah Kota, yang berujung dengan mempertanyakan atau melakukan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Disnakertrans Provinsi Papua Barat, dan selanjutnya diupayakan jalan keluar secepatnya.

Berdasarkan temuan dari proses pendataan di atas, upaya yang dilakukan oleh pihak implementor yaitu tetap melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat khususnya Disnakertrans, mengintensifkan sosialisasi terkait kualifikasi calon penerima manfaat Bantuan Tangan Kasih, memberikan dispensasi terkait syarat penerima yang tidak berada di tempat atau berhalangan hadir dalam proses penyaluran bantuan dapat diwakilkan dengan syarat membawa kelengkapan administrasi berupa Salinan KTP Elektronik atau Karta Keluarga. Keputusan implementor ini bersifat insidental, dibuat untuk merespon cepat dinamika yang terjadi selama proses penyelenggaraan Bantuan Tangan Kasih di Kota Sorong. Sikap responsif implementor tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk tetap hadir dan berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan peneliti setelah melaksanakan penelitian dengan tema keberpihakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Sorong adalah sebagai berikut :

1. Program Bantuan Tangan Kasih ini merupakan buah pemikiran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka yang mencakup dimensi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui strategi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan komunitas dan keagamaan. Anggaran yang digunakan dalam realisasi bantuan berasal dari APBD Provinsi Papua Barat Daya.
2. Bantuan Tangan Kasih adalah program bantuan sosial yang menitikberatkan pada masyarakat yang tidak tervalidasi sebagai penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah misalnya, BPNT,

BLT, PKH atau bantuan sosial sejenis lainnya. Prinsip *no left behind* merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu tetapi tidak tervalidasi sebagai penerima bantuan pemerintah maupun bantuan sosial yang bersifat komplementer.

3. Aspek keberpihakan Pemerintah Kota Sorong terlihat dengan jelas setelah proses penyelenggaraan yang meliputi pendataan calon penerima, penyaluran dan laporan hasil penyelenggaraan Bantuan Tangan Kasih telah rampung. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, Bantuan Tangan Kasih di Kota Sorong telah diimplementasikan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun bentuk keberpihakan pemerintah dapat dimaknai melalui proses kreativitas/inovasi, implementasi, komitmen.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2019. *Kebijakan Publik*. IV. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Adger, W. N. 2000. "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24 (3): 347-64. <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>.
- Afrizal, and Handrisal. 2019. "Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa E kang Anculai Kabupaten Bintan." *Jurnal Wedana* 5 (1): 627-41.
- Barrientos, Armando. 2013. *Social Assistance in Developing Countries*. New York: Cambridge University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fedriansyah, Muhammad. 2016. "Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan - Neliti." *SHARE Social Work Journal*. 2016. <https://www.neliti.com/id/publications/181637/kebijakan-sosial-dalam-pembangunan>.
- Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Pereirinha, José António Correia, and Elvira Pereira. 2021. "Social Resilience and Welfare Systems under COVID-19: A European Comparative Perspective." *Global Social Policy* 21 (3): 569-94. <https://doi.org/10.1177/14680181211012946>.
- Pradoko, Susilo, A.M. 2017. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan, Seni Budaya Dan Humaniora*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Press.
- Rachmawati, Eka, Susie Suryani, Dina Hidayat, Yulefnita Yulefnita, and Randi Saputra. 2022. "Ketahanan Ekonomi Keluarga Kepada Masyarakat Terdampak Covid 19 di Kelurahan Muara Fajar Kota Pekanbaru." *Buletin Pembangunan Berkelanjutan* 5 (3). <https://doi.org/10.25299/bpb.2021.8729>.

- Saldaña, Johnny. 2018. "Researcher, Analyze Thyself." *International Journal of Qualitative Methods* 17 (1): 2036–46. <https://doi.org/10.1177/1609406918801717>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutmasa, Yosep Gede. 2021. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4 (1): 25–36. <https://doi.org/10.47532/JIC.V4I1.242>.
- Wulandari, Prisca Kiki. 2017. "Inovasi Pemuda Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 23 (3): 300. <https://doi.org/10.22146/jkn.28829>.